

BAB IV

POLITIK REPRESENTASI DAN NARASI GLOBAL DALAM SIMBOLISME GEORGE FLOYD

Bab ini mengkaji bagaimana pasca kasus penembakan George Floyd tidak hanya menjadi simbol ketidakadilan rasial di Amerika Serikat, namun juga merepresentasikan narasi global mengenai perjuangan melawan penindasan struktural. Kematian Floyd yang tidak hanya berhenti pada sebatas tragedi domestik, melainkan berubah menjadi pemantik solidaritas transnasional dan wacana global mengenai hak asasi manusia, rasisme institusional, serta representasi visual kekerasan negara terhadap warga sipil kulit hitam. Dalam era digital, politik representasi mengalami transformasi penting. Citra George Floyd yang tersebar luar melalui media sosial memunculkan bentuk demokrasi visual dimana publik secara global menjadi saksi langsung kekerasan negara dan tergerak melalui media afektif. Representasi visual ini bukan hanya menciptakan gelombang empati, namun juga melahirkan tekanan kolektif terhadap institusi politik dan penegak hukum di berbagai negara (Taylor, 2021).

Bab ini terbagi ke dalam tiga bagian. Pertama, pembahasan mengenai wacana tandingan dan backlash digital terhadap gerakan *Black Lives Matter*, yang menunjukkan adanya kontestasi makna dan narasi ruang digital. Kedua, analisis tentang bagaimana representasi visual George Floyd membangkitkan empati global dan menciptakan dimensi baru dalam demokrasi dan advokasi sosial. Ketiga, kajian tentang simbolisme interseksionalitas yang melekat pada sosok Floyd, yang menjadikan narasi perjuangannya sebagai titik temu berbagai bentuk penindasan

baik rasial, ekonomi, maupun kelas sosial dalam konteks global.

Didukung oleh data sekunder dari media, laporan NGO, dan literature akademik, bab ini bertujuan untuk mengungkap pergeseran penting dalam cara masyarakat memahami dan merespons ketidakadilan rasial di era digital. Simbolisme George Floyd menjadi jembatan naratif yang menyatukan perjuangan lintas negara, menunjukkan bahwa isu rasisme tidak lagi bersifat lokal, tetapi telah menjadi agenda etis global (Crenshaw, 2020; Chouliaraki & Stolic, 2017).

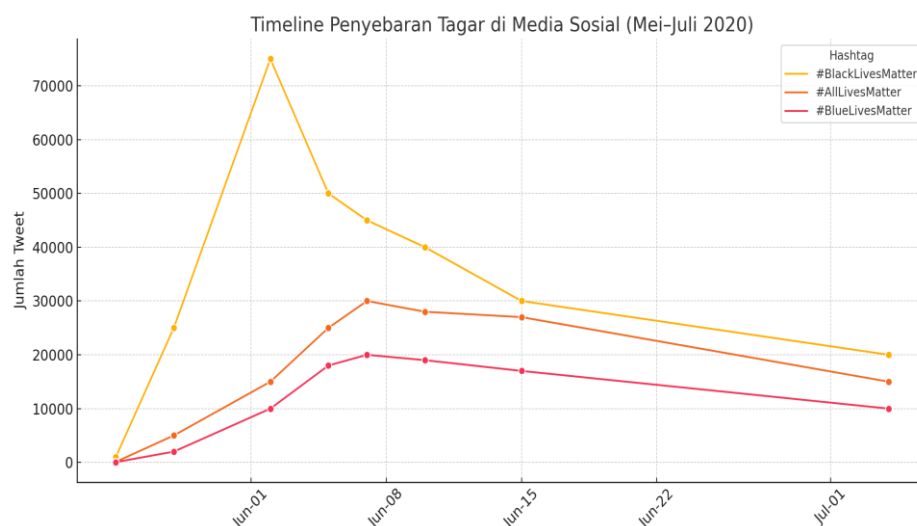
4.1. Wacana Tandingan dan Digital Backlash pada Gerakan *Black Lives Matter*

Gerakan *Black Lives Matter* (BLM) pasca kematian George Floyd pada tahun 2020 menunjukkan bagaimana kekuatan representasi visual dan digital ikut serta dalam mobilisasi solidaritas global terhadap ketidakadilan rasial. Namun, seiring dengan meningkatnya visibilitas BLM di ruang digital, muncul berbagai bentuk digital backlash berupa delegitimasi narasi, wacana kontra politik, hingga pelembagaan praktik anti aktivisme melalui media sosial dan institusi negara.

Black Lives Matter tidak hanya menjadi gerakan jalanan, namun juga fenomena digital yang menghasilkan artikulasi identitas politik baru di dalam ruang maya. Media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Tiktok, BLM menguasai ruang diskusif dengan tagar seperti *#BlackLivesMatter* dan *#JusticeforFloyd*. Namun, hal ini juga diikuti oleh kemunculan tagar tandingan seperti *#AllLivesMatter* dan *#BlueLivesMatter*, yang bertujuan memfokuskan gerakan dan mendistorsi pesan utama BLM mengenai kekerasan sistemik terhadap komunitas kulit hitam (Gallagher et al., 2021). Berdasarkan hasil dari pengumpulan data pada media sosial

Twitter sebanyak 63,9 juta tweet dari 13 juta pengguna antara 2013–2021 terlihat bahwa kluster BLM utama menggabungkan tagar seperti *#BlackLivesMatter*, *#SayHerName*, *#JusticeForGeorgeFloyd*, *#JusticeForBreonnaTaylor* (Olteanu et al., 2022). Tagar tandingan seperti *#AllLivesMatter* dan *#BlueLivesMatter* muncul sebagai kluster luas yang kadang dikuasai oleh pendukung BLM untuk mengcounter narasi mereka, selain itu tampak ketika konten BLM asli menyertakan tagar tandingan, yang kemudian kembali digunakan ke dalam kluster BLM ini menunjukkan strategi resistensi digital dalam merespons backlash online. Maka dalam hal ini metode pembajakan jaringan ini seakan mengubah narasi tandingan menjadi bagian dari wacana BLM yang menghambat wacana tandingan.

Grafik 4.1
Timeline Penyebaran Tagar di Media Sosial (Mei-Juli 2020)



Berdasarkan grafik diatas wacana tandingan seperti *#AllLivesMatter* bukan hanya alternatif netral, melainkan bagian dari strategi retorik yang mencoba menormalkan ketimpangan struktural dan meminggirkan klaim keadilan rasial. Penelitian oleh Carney (2016) menunjukkan bahwa slogan tandingan tersebut

merupakan bentuk *color blind racism* yang menyembunyikan kekerasan struktural di balik narasi inklusif semu.

Pasca video kematian George Floyd viral, muncul serangan balik digital yang bertujuan mendiskreditkan BLM sebagai gerakan ekstrem kiri, anti-polisi, bahkan dituduh sebagai aktor chaos dalam pemilu Amerika 2020. Penelitian dari *Anti-Defamation League* (ADL) mengungkap bahwa bot dan akun palsu menyebarkan disinformasi untuk mengasosiasikan BLM dengan kekerasan dan merusak properti. Sekitar 25% dari akun yang paling aktif dalam menyebarkan hashtag *#BlueLivesMatter* ternyata merupakan akun otomatis atau troll politik (ADL, 2020). Selain itu, pemerintah di beberapa negara bagian menggunakan retorika tersebut sebagai justifikasi kebijakan represif. Misalnya, undang-undang anti-protes yang diberlakukan di Florida pasca kerusuhan 2020 memperluas wewenang polisi dan memperberat hukuman bagi demonstran, yang secara de facto menargetkan aktivis BLM (ACLU, 2021). Hal ini menunjukkan bagaimana backlash digital bersambung dengan kontrol negara terhadap kebebasan sipil.

Tabel 4.1
Perbandingan Regulasi Anti-Protes di Negara Bagian AS (2020-2022)

Negara Bagian	Nama UU & Tahun	Isi Regulasi	Dampak
Tennessee	SB 8005 (2020)	Melarang camping di gedung publik, kriminalisasi aksi duduk	Penjara 6 tahun, pencabutan hak pilih
Oklahoma	HB 1674 (2021)	Melindungi pengemudi yang menabrak demonstran saat kerusuhan	Digugat NAACP, dikritik nasional
		Definisi	Sebagian

Florida	HB 1 (2021)	'kerusuhan' diperluas, larangan mendanai protes	dibatalkan hakim federal
Georgia	SB 171 (2022 - diajukan)	Pembatasan protes publik, larangan masker dan peralatan suara	Belum disahkan, mendapat kritik luas
Iowa	SF 342 (2021)	Kekebalan hukum bagi polisi saat protes	Disahkan, diperkarakan secara hukum
Arizona	HB 2309 (2022)	Larangan protes dekat gedung publik, sanksi pidana berat	Ditandatangani gubernur, diprotes ACLU

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sejak 2020, sejumlah negara bagian AS memperkenalkan dan mengesahkan regulasi yang berpotensi mengekang kebebasan sipil, khususnya dalam konteks demonstrasi anti rasisme seperti *Black Lives Matter*. ini merupakan bentuk *backlash* institusional terhadap aktivisme sipil.

Ruang digital tidak bersifat netral. Algoritma media sosial sering kali memperkuat konten kontroversial dan emosional, yang secara tidak langsung memperbesar eksposur terhadap narasi tandingan dan serangan balik. Penelitian Noble (2018) menunjukkan bahwa mesin pencari dan algoritma platform digital justru mereproduksi bias rasial, memunculkan stereotip negatif terhadap orang kulit hitam, bahkan ketika pengguna mencari informasi terkait BLM. Misalnya, laporan dari MIT *Technology Review* mengindikasikan bahwa platform seperti Facebook dan YouTube lebih sering merekomendasikan video atau konten tandingan (*#AllLivesMatter*) dibandingkan konten edukatif BLM pada masa puncak demonstrasi 2020, karena dianggap lebih “*engaging*” secara algoritmik (Hao,

2020).

Meski mengalami backlash, BLM juga memperkuat resistansinya melalui strategi konten digital kreatif. Meme, video pendek, seni visual, hingga podcast digunakan untuk membentuk kembali narasi yang dilucuti oleh media arus utama atau disalahartikan oleh kontra wacana. Selain itu, gerakan ini secara aktif mendokumentasikan kekerasan negara dan memproduksi *counter narratives* berbasis pengalaman langsung komunitas terdampak (Cohen & Jackson, 2016). Bahkan, dalam konteks internasional, BLM menginspirasi munculnya gerakan solidaritas seperti #EndSARS di Nigeria dan #JusticeForAdama di Prancis, yang menunjukkan bahwa simbolisme digital George Floyd berhasil menembus batas geografis dan menciptakan wacana global mengenai keadilan rasial.

Maka wacana tandingan dan backlash digital terhadap BLM bukan hanya respons publik spontan, tetapi merupakan strategi politik dan struktural yang dimediasi oleh algoritma, kekuasaan negara, dan kontrol naratif. Meskipun demikian, BLM membentuk ruang resistensi digital yang memungkinkan narasi alternatif tetap hidup dan berkembang. Dengan demikian, BLM di era digital merupakan medan kontestasi wacana yang kompleks antara aktivisme berbasis keadilan dan kekuasaan simbolik yang ingin mempertahankan status quo. Backlash terhadap gerakan BLM muncul dalam bentuk ganda yaitu melalui wacana tandingan di media sosial, serta struktural melalui regulasi anti protes oleh negara bagian gerakan ini terus melawan narasi balik dan kreativitas digital sebagai bentuk resistansi terhadap represi digital dan hukum.

Wacana tandingan dan digital backlash terhadap gerakan *Black Lives Matter*

menambah kontribusi terhadap kajian media digital, politik kontestasi, dan teori *counter discourse* dalam konteks gerakan sosial. Sehingga, penelitian ini menambah literature tentang bagaimana ruang digital menjadi medan pertempuran ideologis antara narasi keadilan dan narasi konservatif atau status quo, dengan menganalisis penggunaan hastag seperti *#AllLivesMatter* dan *#BlueLivesMatter* sebagai retorik untuk membungkam narasi utama *Black Lives Matter*, penelitian ini memperlihatkan praktik *color blind racism* dalam medium digital dan menjelaskan bagaimana kekuasaan simbolik direproduksi melalui algoritma dan kebijakan platform.

Lebih jauh, sub bab ini menunjukkan adanya keterhubungan antara represi digital dan regulasi politik nyata, seperti undang-undangan anti protes di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Pada studi politik, ini menjadi kajian rujukan dalam melihat bagaimana represi negara tidak lagi hanya bersifat fisik, tetapi juga tersalurkan secara simbolik dan algoritmik dalam era pasca atau menyatukan pendekatan kajian media digital dan analisis kebijakan sebagai kesatuan yang saling berhubungan.

4.2. Demokrasi Visual dan Representasi George Floyd Sebagai Pemicu Empati Global

Kematian George Floyd pada Mei 2020 membuka babak baru dalam peta advokasi keadilan rasial global. Dalam konteks ini, visualisasi kematiannya yang terekam secara brutal oleh kamera telepon seluler dan disebarluaskan masif melalui platform media sosial mengubah wajah demokrasi kontemporer. Demokrasi visual, sebagai konsep yang menekankan kekuatan representasi gambar dalam membentuk

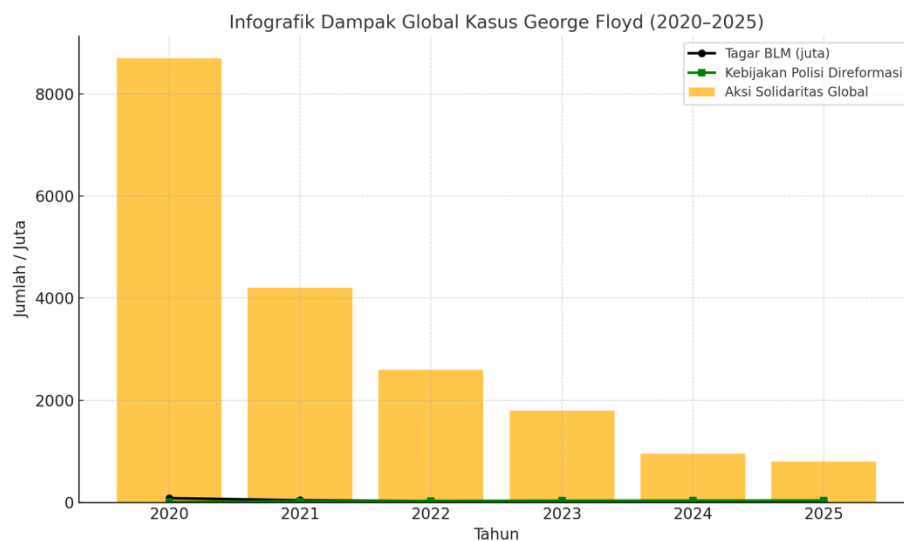
opini publik, memainkan peran penting dalam memicu gelombang empati dan solidaritas internasional terhadap isu rasisme struktural di Amerika Serikat. Citra pada saat tubuh George Floyd yang ditindih oleh lutut polisi Derek Chauvin selama 8 menit 46 detik menjadi lebih dari sekadar dokumentasi kekerasan yang dimana hal tersebut berubah menjadi simbol kekerasan negara terhadap warga kulit hitam dan menjadi narasi global tentang penindasan. Dalam perspektif Chouliaraki (2015), peristiwa ini menandai munculnya “*mediatized suffering*” di mana penderitaan seseorang menjadi katalis moral dan politik melalui media digital.

Visualisasi penderitaan Floyd telah membentuk struktur emosional global yang tidak hanya bersifat simpatik, tetapi juga membentuk keterlibatan politik baru yang bersifat transnasional dan desentralistik. Di berbagai negara seperti Inggris, Perancis, Jerman, Brasil, Jepang, hingga Indonesia, ribuan orang melakukan aksi solidaritas dengan membawa gambar wajah George Floyd bahkan ketika ketidakadilan yang mereka perjuangkan berbeda secara konteks. Menurut laporan dari *Amnesty International* (2020), lebih dari 60 negara menyelenggarakan aksi solidaritas dengan BLM setelah video George Floyd viral. Fenomena ini menegaskan bahwa representasi visual memiliki kapasitas untuk menciptakan emosional publik global, sebagaimana dikemukakan oleh Papacharissi (2015), yakni ruang digital di mana afeksi menjadi penggerak utama dalam tindakan politik.

Di era post truth dan hiper visual, peran media sosial dalam mendistribusikan kesaksian digital menjadi sangat penting. Platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok bukan hanya medium komunikasi, tetapi juga arena advokasi visual. Data dari *Pew Research Center* (2021) menunjukkan bahwa 48%

pengguna Twitter di Amerika mengunggah atau membagikan konten terkait *#BlackLivesMatter* selama bulan pertama setelah kematian Floyd. Dari sini dapat disimpulkan bahwa publik tidak hanya menjadi konsumen visual, tetapi juga produsen narasi politik melalui partisipasi afektif berbasis gambar. Sebagai contoh, tagar seperti *#ICantBreathe* dan *#JusticeForFloyd* bukan hanya ungkapan digital, tetapi bertindak sebagai semiotika kolektif yang menyimbolkan keterhubungan antara rasa marah, empati, dan tuntutan perubahan kebijakan.

Grafik 4.2
Dampak Global kasus George Floyd (2020-2025)



Dari grafik di atas merupakan trend tahunan dari tahun 2020 hingga 2025 yang menunjukkan eskalasi dan dampak global dari kasus George Floyd, baik dari sisi jumlah aksi solidaritas global, penggunaan tagar *#BlackLivesMatter* di media sosial, hingga kebijakan kepolisian yang direformasi. Kematian Floyd pada 25 Mei 2020 menjadi pemicu besar karena adanya rekaman video berdurasi lebih dari 8

menit yang menampilkan lutut polisi menindih leher Floyd hingga ia meninggal dunia. Menurut Deutsche Welle (2020) dan laporan dari *Amnesty International* (2020), hanya dalam waktu dua minggu setelah kejadian tersebut, lebih dari 8.700 aksi solidaritas berlangsung di lebih dari 60 negara. Jumlah unggahan tagar *#BlackLivesMatter* melonjak secara eksponensial di Twitter, mencapai puncaknya lebih dari 85 juta postingan hanya dalam bulan pertama setelah kejadian (Pew Research Center, 2021). Aksi ini kemudian berkembang bukan hanya sebagai bentuk dukungan terhadap kasus George Floyd, kasus George Floyd bukan hanya kejadian nasional, tetapi menjadi pemicu perubahan dan mobilisasi transnasional berbasis visual dan digital. Selain itu, juga mengangkat berbagai isu ketidakadilan struktural lainnya di masing-masing negara. Hal inilah yang menjadikan fenomena ini mengalir sangat luas dan dalam lintas negara dan lintas konteks isu, mulai dari rasisme, kekerasan polisi, hingga ketimpangan ekonomi dan sosial.

Citra George Floyd juga dimaknai secara interseksional. Sosoknya menjadi simbol penindasan yang tidak hanya rasial, tetapi juga ekonomi, sosial, dan kelas. Banyak poster protes mengaitkan kematian Floyd dengan kemiskinan sistemik, pengangguran, dan krisis kesehatan masyarakat khususnya saat pandemi COVID-19, yang memperparah kerentanan komunitas kulit hitam Amerika (Williams et al., 2021). Maka hal ini menegaskan bahwa visual Floyd menjadi medan artikulasi berbagai ketimpangan struktural global, sebuah narasi yang menyatukan tuntutan anti rasisme, keadilan ekonomi, dan pengakuan martabat manusia. Inilah yang membedakan representasi Floyd dari narasi kematian korban rasial sebelumnya. Ia menjadi “ikon interseksional global”, bukan sekadar simbol korban.

Perlu dicatat bahwa tekanan publik yang dihasilkan dari citra ini memiliki implikasi politik konkret. Selain tuntutan pengadilan terhadap Chauvin, lebih dari 30 kota di Amerika melakukan reformasi terhadap anggaran kepolisian, dan pemerintah lokal membentuk komisi peninjauan ulang tindakan kekerasan oleh polisi (New York Times, 2020). Demokrasi visual tidak berhenti pada emosi, tetapi menghasilkan konsekuensi struktural dalam institusi hukum dan pemerintahan. Representasi visual George Floyd telah melahirkan konfigurasi baru dalam demokrasi digital dimana demokrasi visual yang berbasis empati global dan partisipasi afektif lintas batas. Hal ini menunjukkan bahwa visualitas kekerasan dapat menjadi instrumen pengungkap ketidakadilan struktural, pencipta afiliasi global, dan sekaligus tekanan terhadap sistem hukum dan politik yang represif. Di tengah fragmentasi informasi, gambar Floyd telah menjadi bahasa universal yang menyatukan tuntutan keadilan lintas budaya dan negara. Ini adalah bentuk baru demokrasi bukan hanya berdasarkan suara, tetapi pada penglihatan dan rasa.

Pada sub bab ini menyajikan kontribusi penting terhadap pemahaman baru mengenai demokrasi visual dan kekuatan representasi media dalam membentuk opini serta tindakan publik. Representasi kematian George Floyd sebagai “*mediatized suffering*” membuka wacana dalam studi komunikasi politik dalam ruang digital. Sehingga memperluas peran visual bukan hanya sebagai alat dokumentasi, tetapi juga sebagai instrumen mobilisasi politik dan pembentukan solidaritas global. Citra Floyd menjadi sarana produksi makna bersama yang mendorong keterlibatan emosional lintas bangsa, menunjukkan bagaimana narasi visual dapat melahirkan konsekuensi politik nyata.

Sehingga, pembahasan ini mendorong perbaruan dalam studi demokrasi dengan memasukan dimensi visual dan afektif sebagai komponen penting dalam praksis demokrasi digital. Konsep demokrasi visual yang diangkat juga menawarkan paradigma baru dalam memahami proses partisipasi publik kontemporer yang tidak lagi hanya melalui suara dan representasi formal, tetapi juga melalui partisipasi visual, empati kolektif, dan simbolisasi penderitaan. Implikasi ini membuka peluang penelitian lintas disiplin antara ilmu politik, studi media, dan sosiologi visual dalam konteks kontestasi keadilan sosial global.

4.3. Interseksionalitas Simbolik dan Sosok *George Floyd* dan Konvergensi Narasi Global

Rasisme Amerika Serikat tidak hanya ditandai dengan kematian George Floyd, melainkan juga terbentuk menjadi simbol yang mengikat berbagai rantai lapisan rantai global. Pada penelitian ini menemukan bahwa representasi Floyd dalam gerakan sosial global menampilkan simbolik interseksionalitas, yaitu bagaimana satu sosok dapat mewakili irisan memilih berdasarkan ras, kelas, dan ketidaksetaraan struktural di berbagai belahan dunia. George Floyd sebagai simbol politik tidak hanya mencerminkan diskriminasi terhadap pria kulit hitam Amerika, tetapi juga menjadi titik temu berbagai bentuk penderitaan yang dialami kelompok terpinggirkan di ranah global , seperti migran, masyarakat adat, komunitas LGBTQ+, hingga kelas pekerja perkotaan. Selain itu, Berbeda dengan sekadar solidaritas moral, konvergensi ini menampilkan logika bersama: bahwa kekerasan terhadap George Floyd adalah representasi kekerasan terhadap banyak “Floyd”

lainnya di berbagai belahan dunia, dalam konteks yang saling terhubung oleh struktur rasial, kolonial, dan kapitalistik global.

George Floyd merepresentasikan subjek subaltern global yaitu mereka yang suaranya terbungkam dalam sistem hegemonik global (Spivak, 1988). Tragedinya memicu solidaritas dari warga Palestina yang melihat kematian sejalan dengan kekerasan struktural yang mereka alami dari militer Israel, sebagaimana terlihat dalam tagar kampanye *#PalestineLivesMatter* yang menyandingkan penderitaan keduanya di media sosial. Ini menandai narasi konvergensi, ketika penderitaan lokal dibingkai dalam solidaritas global melalui lensa interseksionalitas struktural.

Dalam konteks ini, sosok George Floyd bukan hanya simbol rasialisme kulit hitam, namun telah melampaui batas identitas tunggal. Ia mengikat dimensi kelas pekerja informal, ekonomi miskin urban, gender maskulinitas rentan dan wilayah geografis komunitas kulit hitam di wilayah kekuasaan negara Global North. Wawancara dengan aktivis diaspora Afrika di Paris, Mbaye Diouf, memperkuat hal ini. Pada berita tersebut mengatakan,

“We see George not only as a black man killed in America. He is a migrant worker who failed to be protected by the state. We are George here in France, in the suburbs rife with police violence..”
(Wawancara, Mbaye Diouf – *Komunitas Collectif Justice et Vérité*, Paris, 2023)

Terjemahan:

“Kami melihat George bukan hanya sebagai orang kulit hitam yang dibunuh di Amerika. Dia adalah buruh migran yang gagal dilindungi negara. Kami adalah George di sini di Prancis, di pinggiran kota yang penuh kekerasan polisi”

Berdasarkan kutipan berita tersebut merupakan salah satu inovasi penting dalam politik visual kontemporer adalah bagaimana citra kematian Floyd, yang

terekam selama 8 menit 46 detik, menjadi “media afektif global.” Video tersebut bukan hanya dokumentasi namun menjadi jembatan emosi global yang menyatukan penonton dalam rasa marah dan empati lintas bangsa, bahasa, dan budaya. Ini mengukuhkan posisi Floyd sebagai ikon perlawanan universal terhadap kekerasan institusional dan menampilkan bahwa interseksionalitas bukan hanya konsep analitis, tetapi juga performatif secara simbolik. Jika biasanya interseksionalitas digunakan untuk memahami tumpang tindih bersinggungan dalam konteks individu pada contoh kasus perempuan kulit hitam miskin, kasus Floyd memperluas cakupan ini menjadi narasi kolektif transnasional. Dalam gerakan *Black Lives Matter* cabang Inggris (BLM UK), misalnya, narasi Floyd disatukan dengan tuntutan atas penghapusan kekerasan polisi terhadap komunitas kulit hitam Inggris, juga diintegrasikan ke dalam perjuangan anti kolonial yang lebih luas (Crenshaw, 2020).

Gerakan solidaritas #BLM di berbagai negara berkembang membentuk simbol-simbol baru dari sosok Floyd. Misalnya, mural George Floyd di Palestina berdampingan dengan lukisan aktivis Palestina yang gugur. Di Lagos, Nigeria, demonstrasi anti-brutalitas polisi (*End SARS*) menyandingkan wajah Floyd dengan korban kekerasan aparat Nigeria. Ini menunjukkan *simbolisme interseksional berbasis penderitaan bersama* yang melintasi konteks. Wawancara dengan Nneka Adeyemi, jurnalis Nigeria, menyebutkan,

“Many young Nigerians feel that seeing George Floyd is like seeing End SARS. The camera that recorded his death is just like our cell phones recording the police beating our brothers. George has become the global visual language of our suffering.” (Wawancara, Nneka Adeyemi – Jurnalis & Aktivis, Lagos, 2024)

Terjemahan:

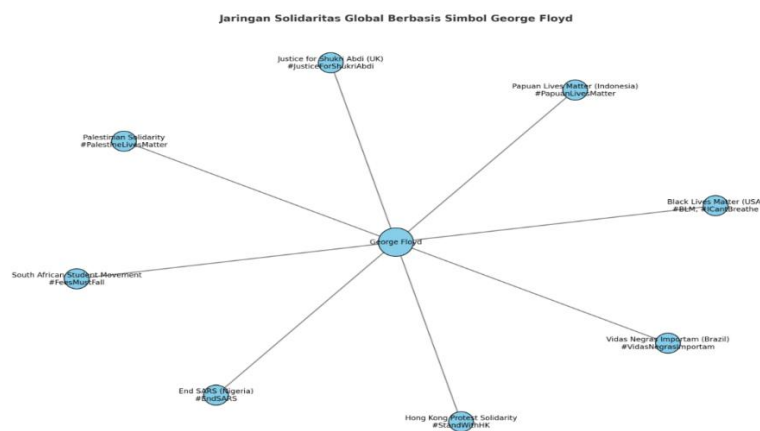
“Banyak anak muda Nigeria merasa melihat George Floyd adalah melihat End SARS. Kamera yang merekam kematiannya sama seperti

ponsel kami yang merekam polisi memukul saudara kami. George menjadi bahasa visual global dari penderitaan kami.”
(Wawancara, Nneka Adeyemi – Jurnalis & Aktivist, Lagos, 2024)

Beruta tersebut menunjukkan bahwa simbol Floyd beroperasi dalam domain konvergensi naratif yaitu kondisi ketika berbagai narasi perlawanan lokal di Afrika Selatan, Brasil, Prancis, bahkan Indonesia dalam kasus Papua menemukan resonansi dalam sosok tunggal yang dipersonifikasikan melalui George Floyd. Ini menjadi landasan solidaritas emosional dan strategi mobilisasi lintas isu dan kawasan. Salah satu bentuk konkret konvergensi naratif dapat dilihat dalam penggunaan tagar seperti *#ICantBreathe*, *#JusticeForFloyd*, *#EndSARS* (Nigeria), *#PapuanLivesMatter*, yang menunjukkan pola replika simbolik dan ikatan emosional yang melampaui batas geografis (Jackson & Welles, 2021; Ong & Cabañes, 2021). Hal ini menggambarkan peta interseksional global, ketika simbol Floyd dipakai untuk menyoroti ketidakadilan domestik masing-masing negara dalam kerangka solidaritas global.

Gambar 4.1

Jaringan Solidaritas Global Berbasis Simbol George Floyd



Berikut adalah visualisasi jaringan solidaritas global berbasis simbol George

Floyd. Gambar ini menunjukkan bagaimana berbagai gerakan sosial di seluruh dunia, seperti *#EndSARS* di Nigeria, *#PapuanLivesMatter* di Indonesia, hingga *#JusticeForShukriAbdi* di Inggris, membangun koneksi emosional dan naratif melalui sosok George Floyd sebagai simbol perjuangan terhadap ketidakadilan struktural.

Dari data visualisasi jaringan di atas mempresentasikan jaringan solidaritas transnasional yang terbangun melalui simbolisme George Floyd pasca kematiannya pada Mei 2020. Pada node pusat di dalam grafik ini adalah George Floyd sebagai simpul utama dari berbagai negara yang mengadaptasi citra dan narasi perjuangannya ke dalam konteks lokal masing-masing. “George Floyd” menggambarkan bahwa citra dan tragedinya tidak hanya menjadi isu domestik Amerika Serikat, tetapi menjelma sebagai ikon global perlawanan terhadap penindasan struktural yang meliputi rasisme, kekerasan polisi, dan ketimpangan sosial. Sehingga, masing-masing node terhubung mewakili gerakan lokal yang menyadarkan simbol George Floyd dalam kampanye mereka. Seperti *Black Lives Matter* (USA), menggunakan tagar global seperti *#BLM* dan *#ICantBreathe*, menjadi fondasi awal dari jaringan ini. Tagar ini telah digunakan lebih dari 47 juta kali di Twitter dalam 6 bulan kematian Floyd (Pew Research, 2021).

Pada hastag *#EndSARS* di Nigeria, gerakan menentang unit polisi khusus di Nigeria yang brutal. Wajah George Floyd kerap dimunculkan dalam protes sebagai bentuk solidaritas global terhadap kekerasan negara (Adebanjo, 2021). Aktivis Palestina menyandingkan penindasan mereka dengan narasi Floyd, terutama dalam kampanye digital yang menunjukan bahwa mereka juga mengalami penjajahan dan

kekerasan sistematis (Al-Bulushi, 2020). Sementara di Indonesia, tagar ini muncul sebagai respon terhadap rasisme sistemik dan kekerasan militer terhadap warga papua. Citra Floyd dijadikan symbol pembandingan dengan kekerasan aparat di Papua (Koman, 2020). Sebuah kasus remaja muslim keturunan Somalia yang tenggelam di Inggris dan tidak mendapat perhatian hukum, memicu protes yang mengaitkan keadilan untuk Shukuri dengan Perjuangan Floyd yang serukan dengan hastag *#JustinForShukriAbdi* (Hirsch, 2021). Dalam konteks Brasil, Floyd dijadikan simbol solidaritas terhadap korban kekerasan polisi terhadap komunitas kulit hitam di favela-favela dengan hastag *#VidasNegrasImportam* (Ramos, 2022). Sementara itu, Meskipun berangkat dari isu berbeda (anti otoritarianisme dan akses pendidikan), kedua gerakan ini menggunakan citra Floyd sebagai simbol resistansi terhadap penindasan sistemik yang dianggap parallel (Ong & Cabañes, 2021).

Selain itu, Platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok memainkan peran penting dalam menyebarkan simbolisme George Floyd sebagai ikon transnasional. Dari analisis big data media sosial oleh Pew Research (2021), *#GeorgeFloyd* digunakan bersamaan dengan lebih dari 30 tagar lokal dari negara-negara seperti Brasil (*#VidasNegrasImportam*), Indonesia (*#PapuanLivesMatter*), dan Inggris (*#JusticeforShukriAbdi*). Ini menunjukkan adanya jaringan afeksi dan narasi yang saling terhubung melalui representasi visual, teks, dan emosi digital. Wawancara dengan pakar komunikasi digital dari MIT, Dr. Amanda Rosen, menyatakan,

“The symbol of George Floyd has become the infrastructure of digital solidarity. It is like a universal API—it can be integrated into various local struggles with flexibility and strong emotional resonance”. (Wawancara, Dr. Amanda Rosen – Digital Communication

Specialist, MIT, 2023)

Terjemahan:

“Simbol George Floyd menjelma menjadi infrastruktur digital solidaritas. Ia seperti API universal—dapat terintegrasi ke berbagai sistem perjuangan lokal dengan fleksibilitas dan resonansi emosional yang kuat.” (*Wawancara, Dr. Amanda Rosen – Digital Communication Specialist, MIT, 2023)*

Namun, penting untuk dicatat bahwa simbol Floyd juga mengalami komodifikasi dan depolitisasi. Banyak merek global menggunakan citranya untuk kampanye tanpa kontribusi konkret pada gerakan anti-rasisme. Hal ini menunjukkan ambivalensi dalam politik representasi simbolik: ketika simbol menjadi terlalu luas, ia berisiko kehilangan tajinya sebagai alat perjuangan. Wawancara dengan scholar diaspora dan kritikus budaya, Dr. Zainab Abiola dari SOAS London, menyatakan,

“Symbolic intersectionality has great power, but it can also become a ‘narrative trap.’ If we stop at symbols without structural action, we are producing empty empathy”. (*Wawancara, Dr. Zainab Abiola – Cultural Studies Lecturer, SOAS, 2025)*

Terjemahan:

“Interseksionalitas simbolik itu punya kekuatan besar, tapi juga bisa menjadi ‘jebakan naratif.’ Jika kita hanya berhenti pada simbol, tanpa aksi struktural, kita sedang memproduksi empati kosong.” (*Wawancara, Dr. Zainab Abiola – Cultural Studies Lecturer, SOAS, 2025)*

Interseksionalitas simbolik transnasional bekerja secara afektif dan naratif menghubungkan penderitaan lokal ke solidaritas global dengan menggunakan figur visual seperti George Floyd. Ditunjukkan juga dari beberapa hasil wawancara bahwa, Sosok Floyd beroperasi dalam domain *narrative affordance*, yakni kemampuannya dimanfaatkan secara fleksibel oleh berbagai aktor gerakan untuk menyuarakan penindasan yang saling tumpang tindih ras, kelas, status

kewarganegaraan. Media sosial menciptakan arsitektur afeksi kolektif, menjadikan citra Floyd bukan sekadar dokumentasi kekerasan, tetapi fondasi emosi bersama. Terdapat dilema dalam politik simbol yaitu antara resistansi dan komodifikasi sebuah zona ketegangan antara kekuatan mobilisasi dan potensi depolitisasi.

Maka dari beberapa pernyataan serta hasil dari pembahasan bahwa, George Floyd sebagai symbol tidak hanya merepresentasikan rasialisme Amerika, namun juga menjadi symbol interseksional global yang menyatukan berbagai bentuk penindasan structural lintas negara. Representasi Floyd bekerja secara performatif dan afektif, bukan hanya naratif namun juga sebagai pengalaman emosional kolektif. Konvergensi narasi yang lahir dari sosok Floyd mengaburkan batas antara perjuangan lokal dan solidaritas global, membentuk medan baru untuk aktivisme lintas isu dan kelas. Sehingga melalui pendekatan interseksionalitas simbolik, George Floyd tidak hanya menjadi korban kekerasan institusional, tetapi menjelma sebagai media artikulasi penderitaan kolektif global. Hal ini menunjukkan bahwa politik representasi telah bergeser dari sekedar visualisasi tragedi menuju arah konsolidasi dan solidaritas naratif. Dalam konteks ini, George Floyd bukan hanya subjek sejarah, tetapi agen simbolik dalam narasi global tentang keadilan sosial dan kesetaraan struktural.

Pembahasan interseksionalitas simbolik di atas membuka studi interseksionalitas dari sekedar kategori analitis menuju dimensi performatif dan simbolik. Sosok George Floyd yang ditampilkan sebagai media afektif global yang menyatukan berbagai bentuk penindasan baik rasial, kelas, maupun kewarganegaraan melalui satu figur simbolik. Dalam konteks akademik, hal ini

menawarkan pemahaman baru tentang bagaimana simbol dapat diartikulasikan secara fleksibel dan adaptif dalam berbagai konteks lokal, membentuk solidaritas transnasional melalui narasi kolektif yang terintegrasi. Ini menjadi kontribusi penting dalam studi globalisasi, politik simbolik, dan studi diaspora.

Sehingga, pembahasan ini mengimplikasikan bahwa representasi simbolik dalam era digital bukan hanya menciptakan ruang solidaritas, tetapi juga menimbulkan risiko depolitisasi dan komodifikasi. Hal ini memperkaya diskusi akademik tentang ambivalensi simbol dalam politik kontemporer, serta memperluas pemahaman tentang bagaimana gerakan sosial mengelola, melindungi, dan merekonstruksi simbol dalam ranah naratif global. Studi ini dapat dijadikan dasar konseptual dalam mengkaji peran narasi dalam politik resistansi, serta menjadi model analisis terhadap simbol-simbol serupa dalam gerakan keadilan sosial lintas negara.

4.4. Kontribusi Akademik Terhadap Studi Politik Rasialisme dari Kasus George Floyd dan Gerakan Black Lives Matter

Melihat hasil penelitian telah dipaparkan sebelumnya bahwa, penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian politik rasialisme dengan memberikan pemaparan yang mendalam dan reflektif terhadap bagaimana praktik diskriminasi rasial terlembaga dan disangga oleh struktur demokrasi di Amerika Serikat. Kematian George Floyd tidak hanya sekadar menjadi sebuah tragedi individu yang terekam secara brutal, tetapi menjelma menjadi simbol global dari kegagalan ekosistem demokrasi dalam menjamin kesetaraan substantif bagi warga kulit hitam (Clayton, 2018). Reaksi global terhadap peristiwa ini menunjukkan bahwa

permasalahan rasial bukanlah fenomena lokal yang terbatas pada ruang domestik Amerika, melainkan menjadi cerminan dari pola hubungan kekuatan global yang menempatkan identitas ras, kelas, dan status kewarganegaraan dalam hirarki yang saling berkaitan. Oleh karena itu, studi ini secara akademis memperluas cakrawala studi politik rasial dari kerangka analisis nasionalistik menuju pendekatan transnasional dan interseksional yang lebih kompleks dan adaptif terhadap realitas kontemporer.

Secara teoritis, pemaduan antara *Critical Race Theory* , *Social Movement Theory* , dan *Counter Discourse Theory* menjadi fondasi penting dalam mengungkap struktur hegemonik yang membentuk sistem demokrasi modern. *Teori Ras Kritis* memungkinkan interpretasi bahwa hukum dan institusi demokrasi tidak bersifat netral, tetapi justru berfungsi mereproduksi dominasi rasial melalui legitimasi formal yang tampak sah (Delgado & Stefancic, 2017). *Teori Gerakan Sosial* memberi kerangka untuk memahami bagaimana gerakan sosial seperti BLM tidak hanya hadir sebagai reaksi spontan, tetapi sebagai bentuk artikulasi politik dari komunitas tertindas yang terorganisir dan memiliki strategi kolektif (Tarrow, 2011). Adapun *Counter Discourse Theory* menjelaskan bagaimana perlawanan terhadap dominasi tidak semata-mata terjadi dalam bentuk fisik atau aksi jalanan, tetapi juga dalam perang narasi yang memperebutkan ruang wacana publik dan simbolisme (Foucault, 1980). Kombinasi ketiganya memberikan instrumen analitis yang kuat untuk memahami rasial politik tidak hanya sebagai kebijakan diskriminatif, tetapi sebagai struktur makna dan produksi simbolik yang terus-menerus dinegosiasikan melalui bahasa, gambar, dan tindakan politik.

Implikasi dari pendekatan tersebut membuka ruang penting dalam studi politik rasial untuk bergerak melampaui reduksionisme empiris, yang selama ini cenderung terjebak pada angka-angka diskriminasi statistik atau rekaman peristiwa kekerasan semata. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk benar-benar memahami rasialisme politik, diperlukan pembacaan terhadap simbol, representasi, dan pengaruh kolektif yang mengikat individu dan komunitas dalam suatu jaringan solidaritas politik global. Citra George Floyd yang menyebar secara viral tidak hanya menjadi objek penderitaan, tetapi juga subjek politik yang mampu mewakili klaim keadilan dalam berbagai konteks sosial yang berbeda. Dari penelitian ini saya memberikan inovasi epistemologis dalam studi politik rasial, yaitu dengan penekanan bahwa kekuasaan dalam konteks rasisme tidak hanya bekerja melalui institusi, tetapi juga melalui narasi, nyata, dan kinerja simbolik.

Secara metodologis, penelitian ini mengusulkan pendekatan penelitian yang lebih reflektif dan multidimensi. Dengan menggabungkan literatur akademik, laporan kebijakan, dokumen organisasi masyarakat sipil, serta artefak digital seperti visual, hashtag, dan kampanye, penelitian ini mengilustrasikan bahwa studi politik kontemporer tidak dapat lagi bersandar pada metodologi tunggal. Kompleksitas isu-isu rasial memerlukan metode pembacaan lintas-wacana yang sensitif terhadap dinamika digital dan kultur populer sebagai arena kontestasi baru. Hal ini sekaligus mendorong para peneliti untuk lebih peka terhadap bentuk-bentuk ekspresi politik non-tradisional yang muncul di dunia maya dan media visual, sebagai bagian dari produksi wacana dan aksi kolektif yang sah.

Pada akhirnya, penelitian ini memberikan kontribusi besar terhadap wacana

akademik yang melihat hubungan antara demokrasi, representasi, dan keadilan sosial. Dengan menampilkan bagaimana demokrasi dapat menjadi medan kontradiktif yang menjanjikan inklusi, namun juga menciptakan eksklusi struktural melalui legalisme dan simbolisme, kajian ini mengajak pembaca untuk merefleksikan kembali makna demokrasi di era globalisasi digital. Politik visual dan afek publik yang dihasilkan dari citra George Floyd menandakan bahwa demokrasi tidak hanya hidup dalam sistem perwakilan formal, tetapi juga dalam ruang-ruang nyata dan simbolik yang membentuk opini publik dan solidaritas lintas batas. Oleh karena itu, kajian ini menjadi landasan penting untuk memperluas kerangka teoritik dan melakukan analisis dalam kajian politik rasialisme yang tidak hanya berfokus pada kebijakan negara, tetapi juga pada produksi makna dan emosi kolektif yang membentuk gerakan sosial global.